



DJKN

Sumsel, Jambi, dan Babel

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (*AUDITED*)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

TINGKAT SATKER
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA SELATAN,
JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG

*Gedung Keuangan Negara Lantai 3
Jalan Kapten A. Rivai nomor 4, Palembang*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai dengan Lampiran Laporan Keuangan meliputi informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 4 Mei 2026
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	5
RINGKASAN	6
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	10
II. NERACA	11
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	12
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	13
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	14
A. PENJELASAN UMUM	15
A.1. Dasar Hukum	15
A.2. Profil Kantor	15
A.3. Basis Akuntansi	16
A.4. Dasar Pengukuran	17
A.5. Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.1. Pendapatan	24
B.2. Belanja	25
B.3. Belanja Pegawai	26
B.4. Belanja Barang	27
B.5. Belanja Modal	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
C.1. Kas di Bendaharan Pengeluaran	29
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	29
C.3. Kas Lainnya Setara Kas	29
C.4. Belanja Dibayar Dimuka	29
C.5. Uang Muka Belanja	29
C.6. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	29
C.7. Piutang Bukan Pajak	30
C.8. Persediaan	30
C.9. Tanah	30
C.10. Peralatan dan Mesin	30
C.11. Gedung dan Bangunan	30
C.12. Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.13. Aset Tetap Lainnya	30
C.14. Konstruksi Dalam Pengerjaan	30
C.15. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
C.16. Aset Lain-Lain	31

C.17. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	31
C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga	31
C.19. Utang Yang Belum Ditagihkan	31
C.20. Uang Muka dari KPPN	31
C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya	31
C.22. Ekuitas	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	33
D.2. Beban Pegawai	33
D.3. Beban Persediaan	33
D.4. Beban Barang dan Jasa	33
D.5. Beban Pemeliharaan	34
D.6. Beban Perjalanan Dinas	34
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	34
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	35
D.10. Surplus / (Defisit) dari kegiatan Operasional	35
D.11. Surplus / (Defisit) Kegiatan Non Operasional	35
D.12. Pos Luar Biasa	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
E.1. Ekuitas Awal	36
E.2. Surplus (Defisit) LO	36
E.3. Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	36
E.4. Selisih Revaluasi Aset	36
E.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	36
E.6. Lain-lain.....	36
E.7. Transaksi Antar Ekuitas	36
E.8. Kenaikan / Penurunan Ekuitas	36
E.9. Ekuitas Akhir	37
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	38
F.1. Temuan dan Tindak Lanjut BPK	38
F.2. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual	38
F.3. Rekening Pemerintah	38
F.4. Pengungkapan Lain-Lain	38
LAMPIRAN 1 INFORMASI PENTING LAINNYA DAN CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN	39
A. INFORMASI PENTING LAINNYA	39
1. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama	39
2. Penjelasan Perbedaan LRA dan LO masing-masing pos pada CaLK pendapatan dan beban LO	39
B. INFORMASI KINERJA SATKER TAHUN 2025	40



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG LANTAI 3, JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 4, KOTA PALEMBANG,
SUMATERA SELATAN 30135;
TELEPON (0711) 362132, 317772; FAKSIMILE (0711) 310469; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai dengan Lampiran Laporan Keuangan meliputi informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 4 Mei 2026
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.861.317.813,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.402.298.696,00 atau mencapai 31 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.769.166.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2025			TA 2024
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	4.054.727.000	6.861.317.813	169.2	6.184.893.354
Belanja Negara	7.769.166.000	2.402.298.696	30.92	4.020.514.459

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset adalah sebesar Rp11.277.897.740,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp227.763.085,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.048.665.905,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.468.750,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.132.000,00 dan Rp11.275.765.740,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/ (Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	227.763.085	102.645.080	125.118.005	121.89
Aset Tetap	11.048.665.905	11.121.979.047	(73.313.142)	(0.66)
Aset Lainnya	1.468.750	0	1.468.750	0
Jumlah Aset	11.277.897.740	11.224.624.127	53.273.613	0.47
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	2.132.000	2.082.261	49.739	2.39
Jumlah Kewajiban	2.132.000	2.082.261	49.739	2.39
Ekuitas				
Ekuitas	11.275.765.740	11.222.541.866	53.223.874	0.47
Jumlah Ekuitas	11.275.765.740	11.222.541.866	53.223.874	0.47
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.277.897.740	11.224.624.127	53.273.613	0.47

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.964.572.381,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.643.688.604,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.320.883.777,00.

Surplus Kegiatan Non Operasional senilai Rp4.153.100,00 dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp0,00, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp4.325.036.877,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Perpajakan	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	6.964.572.381	6.068.218.754	896.353.627
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Operasional	6.964.572.381	6.068.218.754	896.353.627
Beban Operasional	2.643.688.604	2.962.533.357	(318.844.753)
Surplus/Defisit Operasional	4.320.883.777	3.105.685.397	1.215.198.380
Surplus/Defisit Non Operasional	4.153.100	96.246.350	(92.093.250)
Pos Luar Biasa	0	0	0
Surplus/Defisit - LO	4.325.036.877	3.201.931.747	1.123.105.130

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp11.222.541.866,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp4.325.036.877,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp65.503,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp4.271.878.506,00), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp11.275.765.740,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Ekuitas Awal	11.222.541.866	9.029.058.358	2.193.483.508
Surplus/Defisit - LO	4.325.036.877	3.201.931.747	1.123.105.130
Koreksi-koreksi	65.503	0	65.503
Transaksi Antar Entitas	(4.271.878.506)	(1.008.448.239)	(3.263.430.267)
Ekuitas Akhir	11.275.765.740	11.222.541.866	53.223.874

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* dilampiri dengan informasi capaian kinerja dan program prioritas nasional tahun 2025. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI					
a. Penerimaan Perpajakan		0	0	0	0
i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri		0	0	0	0
ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0	0
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.054.727.000	6.861.317.813	169.2	6.184.893.354
i. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)		0	0	0	0
ii. Pendapatan PNBP Lainnya		4.054.727.000	6.861.317.813	169.2	6.184.893.354
2. HIBAH		0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		4.054.727.000	6.861.317.813	169.2	6.184.893.354
B. BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
1. Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
2. Belanja Barang	B.4	2.813.227.000	2.233.438.696	79.39	2.628.239.278
3. Belanja Modal	B.5	4.955.939.000	168.860.000	3.41	1.392.275.181
JUMLAH BELANJA		7.769.166.000	2.402.298.696	30.92	4.020.514.459

II. NERACA

KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Di Muka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	202.413.792	90.224.400
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.7	-	-
Persediaan	C.8	25.349.293	12.420.680
JUMLAH ASET LANCAR		227.763.085	102.645.080
ASET TETAP			
Tanah	C.9	8.240.499.006	8.240.499.006
Peralatan dan Mesin	C.10	5.464.225.933	5.672.425.185
Gedung dan Bangunan	C.11	2.046.291.174	2.051.072.898
Jalan, Irigasi dan lainnya	C.12	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.13	5.382.800	5.382.800
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.15	(4.707.733.008)	(4.847.400.842)
JUMLAH ASET TETAP		11.048.665.905	11.121.979.047
ASET LAINNYA			-
Aset Lain-Lain	C.16	347.092.953	194.250.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(345.624.203)	(194.250.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		1.468.750	-
JUMLAH ASET		11.277.897.740	11.224.624.127
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.18	2.132.000	2.082.261
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.19	-	-
Uang Muka Dari KPPN	C.20	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.21	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.132.000	2.082.261
JUMLAH KEWAJIBAN		2.132.000	2.082.261
EKUITAS			
Ekuitas	C.22	11.275.765.740	11.222.541.866
JUMLAH EKUITAS		11.275.765.740	11.222.541.866
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.277.897.740	11.224.624.127

III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

**KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

Uraian	CATATAN	Tahun 2025	Tahun 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan		-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.964.572.381	6.068.218.754
JUMLAH PENDAPATAN		6.964.572.381	6.068.218.754
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	28.452.870	34.405.390
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.303.929.726	1.507.097.672
Beban Pemeliharaan	D.5	321.006.259	301.574.900
Beban Perjalanan Dinas	D.6	567.842.228	781.020.348
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	422.457.521	338.435.047
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	-	-
JUMLAH BEBAN		2.643.688.604	2.962.533.357
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.10	4.320.883.777	3.105.685.397
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		4.153.100	96.246.350
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	4.153.100	96.246.350
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		4.325.036.877	3.201.931.747
SURPLUS/DEFISIT LO		4.325.036.877	3.201.931.747

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

KANWIL DJKN SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

Uraian	CATATAN	Tahun 2025	Tahun 2024
EKUITAS AWAL	E.1	11.222.541.866	9.029.058.358
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	4.325.036.877	3.201.931.747
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	65.503	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.5	65.503	-
LAIN-LAIN	E.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	(4.271.878.506)	(1.008.448.239)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.8	53.223.874	2.193.483.508
EKUITAS AKHIR	E.9	11.275.765.740	11.222.541.866

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
9. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-86/PB/2026 tanggal 6 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited*.

Profil Entitas

A.2. Profil Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan

tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lt. III, Jalan Kapten A. Rivai nomor 4, Palembang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung mempunyai visi “*Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.*”

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung adalah 5 (lima) satker. Rincian satker dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Daftar Satker Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

No.	Nama Satker	Jumlah Satker
1.	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	1
2.	KPKNL Palembang	1
3.	KPKNL Jambi	1
4.	KPKNL Pangkalpinang	1
5.	KPKNL Lahat	1
	Jumlah	5

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung pada Tahun 2025 adalah 115,12 sedangkan NKO Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung pada Tahun 2024 sebesar 115,18%.

**Basis
Akuntansi**

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO**

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Piutang Negara

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah.
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015, Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan karena adanya revisi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Ringkasan Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi

(dalam rupiah)

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	4.054.727.000	4.054.727.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	4.054.727.000	4.054.727.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	2.707.727.000	2.813.227.000
Belanja Modal	4.958.466.000	4.955.939.000
Jumlah Belanja	7.666.193.000	7.769.166.000

Realisasi

Pendapatan

Rp6.861.317.813,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.861.317.813,00 atau mencapai 169.22 persen dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.054.727.000. Pendapatan pada satker Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung berasal dari pendapatan penjualan peralatan dan mesin, pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas II, dan pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan iuran badan usaha	-	4.153.100	-
Pendapatan jasa lainnya	-	-	-
Pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan	4.054.727.000	6.851.737.498	168,98
Pendapatan Denda	-	645.491	-
Pendapatan Lain-Lain	-	4.781.724	-
Jumlah	4.054.727.000	6.861.317.813	169,22

Realisasi Pendapatan periode 31 Desember 2025 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 11,24 persen dibandingkan realisasi 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena naiknya pendapatan dari pengguna jasa lelang melalui Pejabat Lelang Kelas II.

Perbandingan realisasi pendapatan tersaji sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Des 2025	Realisasi 31 Des 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan iuran badan usaha	4.153.100	96.271.000	-
Pendapatan jasa lainnya	-	60.000	-
Pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan	6.851.737.498	6.071.225.678	12,86
Pendapatan Denda	645.491	281.676	-
Pendapatan Lain-Lain	4.781.724	-	-
Jumlah	6.861.317.813	6.167.838.354	11,24

*Realisasi Belanja
Negara
Rp2.402.298.696,00*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.402.298.696,00 atau 31% dari anggaran belanja sebesar Rp7.769.166.000,00.

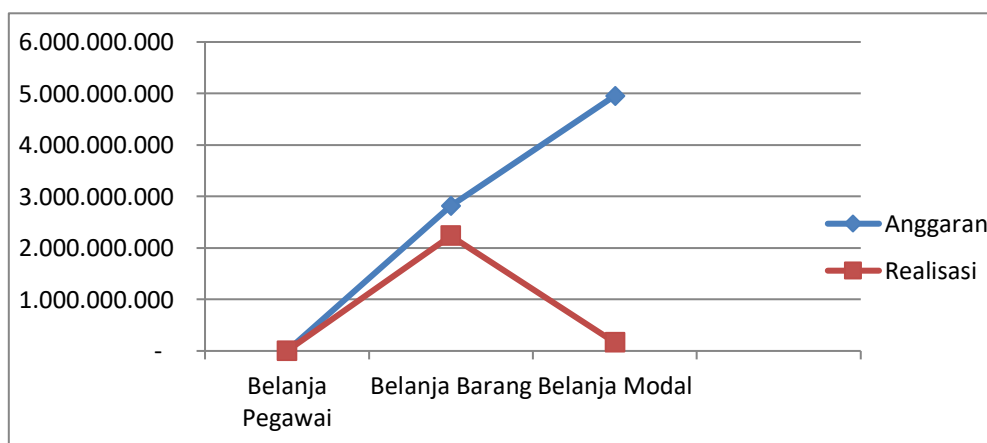
Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.813.227.000	2.233.438.696	79
Belanja Modal	4.955.939.000	168.860.000	3
Jumlah	7.769.166.000	2.402.298.696	31

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Mulai tahun 2021 telah dilaksanakan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN, sehingga pada tahun 2025 dan tahun 2024 tidak ada anggaran Belanja Pegawai.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Belanja Barang

Rp2.233.438.696,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.233.438.696,00 dan Rp2.628.239.278,00. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember TA 2025 mengalami penurunan sebesar 15.02% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Penurunan terjadi pada beberapa jenis belanja seperti belanja operasional, belanja non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri karena adanya kebijakan efisiensi anggaran berupa blokir anggaran pada tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	923.895.020	849.927.196	8,70
Belanja Barang Non Operasional	374.913.706	634.834.410	(40,94)
Belanja Barang Persediaan	41.381.483	39.699.050	4,24
Belanja Jasa	4.400.000	21.183.374	(79,23)
Belanja Pemeliharaan	321.006.259	301.574.900	6,44
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	567.842.228	781.020.348	(27,29)
Jumlah	2.233.438.696	2.628.239.278	(15,02)

Belanja Modal

Rp168.860.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp168.860.000,00 dan Rp1.392.275.181,00. Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember TA 2025 mengalami

penurunan sebesar 88% dari Realisasi Belanja Modal TA 2024. Penurunan terjadi karena pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat Pagu untuk pengadaan kendaraan dinas jabatan, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran belanja modal berupa pembangunan rumah negara. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal lingkup Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.860.000	717.256.000	(76)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	675.019.181	-
Jumlah	168.860.000	1.392.275.181	(88)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Belanja Dibayar
Dimuka Rp 0,00*

C.4 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima secara seluruhnya.

*Uang Muka Belanja
Rp0,00*

C.5 Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka Belanja periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

*Pendapatan Yang
Masih Harus Diterima
Rp202.413.792,00*

C.6 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp202.413.792,00. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima periode 31 Desember 2025 adalah pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas II.

Piutang Lainnya
Rp0,00

C.7 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Lainnya periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Persediaan
Rp25.349.293,00

C.8 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.349.293,00.

Tanah
Rp8.240.499.006,00

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.240.499.006,00.

Peralatan dan Mesin
Rp5.464.225.933,00

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.464.225.933,00.

Gedung dan Bangunan
Rp2.046.291.174,00

C.11 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.046.291.174,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan R0,00

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Aset Tetap Lainnya
Rp5.382.800,00

C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan. Saldo Aset Tetap lainnya periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.382.800,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp4.707.733.008,00)

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 sebesar (Rp4.707.733.008,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lain-lain Rp347.092.953,00

C.16 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain periode 31 Desember 2025 sebesar Rp347.092.953,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp345.624.203,00)

C.17 Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya periode 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp345.624.203,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp2.132.000,00

C.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.132.000,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0,00

C.19 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Uang Muka Dari KPPN Rp0,00

C.20 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00

C.21 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Ekuitas

Rp11.275.765.740,00

C.22 Ekuitas

Ekuitas periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.275.765.740,00
Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp6.964.572.381,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.964.572.381,00 dan Rp6.068.218.754,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,77% dibandingkan dengan sebelumnya.

Beban Pegawai
Rp0,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 karena adanya sentralisasi pengelolaan belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Beban Persediaan
Rp28.452.870,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.452.870,00 dan Rp34.405.390,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami penurunan sebesar 17.301% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beban Barang dan Jasa
Rp1.303.929.726,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.303.929.726,00 dan Rp1.507.097.672,00. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar 13.48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

*Beban Pemeliharaan
Rp321.006.259,00*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp321.006.259,00 dan Rp301.574.900,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 6.44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp567.842.228,00*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp567.842.228,00 dan Rp781.020.348,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan sebesar (27.3%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp 0.,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp422.457.521,00*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp422.457.521,00 dan Rp338.435.047,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp 0,00*

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Operasional
Rp4.320.883.777,00*

D.10 Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp4.320.883.777,00 dan Rp3.105.685.397,00.

*Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp4.153.100,00*

D.11 Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.153.100,00 dan Rp96.246.350,00.

*Pos Luar Biasa Rp
0,00*

D.12 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp11.222.541.866,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.222.541.866 dan Rp9.029.058.358,00

Defisit LO
Rp4.325.036.877,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.325.036.877,00 dan Rp3.201.931.747,00.

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas
Rp65.503,00

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp65.603,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

E.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp65.503,00

E.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp65.503,00 dan Rp0,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi merupakan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang dilakukan koreksi nilai aset tetap non revaluasi.

Lain-Lain
Rp0,00

E.6 Lain-Lain

Lain-Lain untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Transaksi Antar Entitas
(Rp4.271.878.506,00)

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp4.271.878.506) dan (Rp1.008.448.239).

Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Rp53.223.874,00

E.8 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp53.223.874,00 dan Rp2.193.483.508,00.

Ekuitas Akhir

Rp11.275.765.740,00

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.275.765.740,00 dan Rp11.222.541.866,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK

Tidak ada.

F.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung adalah:

- PT. Bank Mandiri (Persero), KCP Palembang Sudirman, A/C 8100125378801000 a.n. BPG 014 Kanwil DJKN Sumsel Jambi Babel.
- PT. Bank Mandiri (Persero), KCP Palembang KPPN, A/C 1120023844587 a.n. RPL 014 PS Kanwil DJKN SJB UTK TKPKN.

F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.4.1 Pejabat Pengelola Keuangan

- Berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Nomor KEP-92/WKN.04/2025 tanggal 7 November 2025, Pengelola Pengguna Anggaran:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ferdinan Lengkong
Pejabat Pembuat Komitmen	: Rakhmat Mahsan
Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	: Wirto
Bendahara Pengeluaran	: Filzah Mutia
Staf Pengelola Pengguna Anggaran	: Nilasari Fitriani
Staf Pengelola Pengguna Anggaran	: Bobby Lusanto
Staf Pengelola Pengguna Anggaran	: Rizki Noviyanti

LAMPIRAN 1 INFORMASI PENTING LAINNYA DAN CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN

A. INFORMASI PENTING LAINNYA

1. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Tidak terdapat Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.

2. Penjelasan Perbedaan LRA dan LO Masing-Masing Pos pada Calk Pendapatan dan Beban LO

No	Kode Akun	Nama Akun	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih	Keterangan
1	425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	6.851.737.498	6.963.926.890	(112.189.392)	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 42XXXX)
2	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	4.781.724	0	4.781.724	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 42XXXX)
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	722.622.920	722.422.920	200.000	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 52XXXX)
4	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.076.200	12.997.200	(921.000)	Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 52XXXX)

Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tahun 2025 Audited

B. INFORMASI KINERJA SATKER TAHUN 2025

Satker : Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Fungsi : 01 Pelayanan Umum
 Subfungsi : 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Kode	Kegiatan	BELANJA			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	996.331.000,00	675.097.265,00	67,76%					
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	156.718.000,00	94.105.387,00	60,05%					
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	156.718.000,00	94.105.387,00	60,05%					
001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	129.122.000,00	85.413.387,00	66,15%	271	461	Orang	100%	Anggaran diblokir sebagian
002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	17.932.000,00	8.692.000,00	48,47%	29	102	Orang	100%	Anggaran diblokir sebagian
003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	9.664.000,00	-	0,00%	20	43	Orang	100%	Anggaran diblokir 100%
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	338.678.000,00	197.099.466,00	58,20%					
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	338.678.000,00	197.099.466,00	58,20%					
001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	254.596.000,00	135.349.141,00	53,16%	1	13	Rekomendasi	100%	Anggaran diblokir sebagian
002	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	49.932.000,00	27.700.463,00	55,48%	1	2	Rekomendasi	100%	Anggaran diblokir sebagian
003	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	34.150.000,00	34.049.862,00	99,71%	9	21	Rekomendasi	100%	Anggaran diblokir sebagian
4798	Pengelolaan Aset	489.087.000,00	378.512.412,00	77,39%					
AAH	Peraturan lainnya	30.432.000,00	28.669.302,00	94,21%					
001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	30.432.000,00	28.669.302,00	94,21%	2	12	Surat Keputusan	100%	Anggaran diblokir sebagian
FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	65.278.000,00	16.901.598,00	25,89%					
004	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	40.982.000,00	-	0,00%	33	33	Orang	100%	Anggaran diblokir 100%
005	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	24.296.000,00	16.901.598,00	69,57%	1	26	Orang	100%	Anggaran diblokir sebagian
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	183.518.000,00	125.774.286,00	68,54%					
004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	48.880.000,00	48.591.946,00	99,41%	3	6	Rekomendasi	100%	Anggaran diblokir sebagian
005	Rekomendasi Hasil Penilaian	56.088.000,00	55.883.422,00	99,64%	2	7	Rekomendasi	100%	Anggaran diblokir sebagian
007	Penggalan Potensi Lelang	78.550.000,00	21.298.918,00	27,12%	3	22	Rekomendasi	100%	Anggaran diblokir sebagian
FAK	Pengelolaan Aset BUN	209.859.000,00	207.167.226,00	98,72%					
001	Aset BUN yang Dikelola	209.859.000,00	207.167.226,00	98,72%	12	32	Aset	100%	
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	11.848.000,00	5.380.000,00	45,41%					
ACE	Perizinan Profesi	11.848.000,00	5.380.000,00	45,41%					
001	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	11.848.000,00	5.380.000,00	45,41%	5	5	Orang	100%	Anggaran diblokir sebagian
WA	Program Dukungan Manajemen	6.772.835.000,00	1.727.201.431,00	25,50%					
4700	Legislasi dan Litigasi	33.451.000,00	31.894.421,00	95,35%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	33.451.000,00	31.894.421,00	95,35%					
969	Layanan Bantuan Hukum	33.451.000,00	31.894.421,00	95,35%	4	11	Layanan	100%	Anggaran diblokir sebagian
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6.592.558.000,00	1.631.579.959,00	24,75%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.636.619.000,00	1.462.719.959,00	89,37%					
002	Kerumah tanggaaan	257.747.000,00	176.437.197,00	68,45%	12	12	Layanan	100%	Anggaran diblokir sebagian
994	Layanan Perkantoran	1.378.872.000,00	1.286.282.762,00	93,29%	12	12	Layanan	100%	Anggaran diblokir sebagian
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.955.939.000,00	168.860.000,00	3,41%					
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	168.860.000,00	168.860.000,00	100,00%	5	5	Unit	100%	
004	Gedung/Bangunan	4.787.079.000,00	-	0,00%	620	0	M2	0,1%	Anggaran diblokir 100% kegiatan tidak dapat
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	98.142.000,00	36.826.100,00	37,52%					
BMB	Komunikasi Publik	98.142.000,00	36.826.100,00	37,52%					
001	Pembinaan/Edukasi Publik	22.672.000,00	13.183.500,00	58,15%	250	345	Orang	100%	Anggaran diblokir sebagian
002	Kehumasan	38.422.000,00	15.173.600,00	39,49%	16	47	Kegiatan	100%	Anggaran diblokir sebagian
003	Pameran/Eksibisi	37.048.000,00	8.469.000,00	22,86%	2	5	Kegiatan	100%	Anggaran diblokir sebagian
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan	48.684.000,00	26.900.951,00	55,26%					
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	48.684.000,00	26.900.951,00	55,26%					
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	48.684.000,00	26.900.951,00	55,26%	5	5	Dokumen	100%	Anggaran diblokir sebagian
	Subtotal	7.769.166.000,00	2.402.298.696,00	30,92%					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)	-	-	-					
	Total	7.769.166.000,00	2.402.298.696,00	30,92%					